ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN PANDEMI COVID-19

Aldehin Banoet^{1*}, Meyulinda A. Elim², Alfred Tandirura Rantelobo³

^{1,2,3}Nama Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Kupang

¹E-mail: ald3banoet@gmail.com

Abstract

Research on village fund management in tackling the Covid-19 pandemic (a case study in Kuanheun Village, West Kupang District, Kupang Regency, East Nusa Tenggara Province) aims to find out the process of managing village funds, especially at the budgeting stage (in the budgeting stage related to the preparation of the Village Income and Expenditure Budget. Fiscal Year 2020, changes to the Village Fund Budget for 2020, changes in priorities for the use of village funds in this case for the response to the Covid-19 Pandemic and the principles for drafting the Des Income and Expenditure Budget), the implementation stage (the implementation stage of village funds is related to the stages and requirements for distributing Village Funds In 2020, activities for handling Covid-19, Village Fund Direct Cash Assistance, and village financial administration) and the accountability stage in dealing with the Covid-19 pandemic (this accountability stage is related to the accountability report to be submitted to the Regent and the Village Consultative Body). This type of research uses a case study technique with a qualitative descriptive approach. The sample in this study amounted to 40 people consisting of village officials and the Kuanheun village community. Data collection was carried out by means of questionnaires, interviews and documentation which will be analyzed using qualitative descriptive methods in three stages, namely data reduction, data presentation, verification and conclusion. Based on the results of the analysis, it shows that the management of village funds at the budgeting stage has been carried out well but at the implementation stage and the accountability has not been fully carried out properly because at the implementation stage there are still activities which is not implemented according to what has been determined and at the accountability stage there is still no report made such as the first semester Realization of the Use of Village Funds Report.

Keywords: Village Fund Management, Prevention, Covid-19 Pandemic

PENDAHULUAN

Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 Sebagai Undang-Undang. Implikasi pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan, sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaringan pengamanan sosial (*social safety net*), serta

untuk pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak. Implikasi Covid-19 juga telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktifitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan.

Kebijakan strategis yang tidak kalah krusialnya yaitu mengeluarkan Instruksi Presiden atau Inpres Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Refocusing kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa alam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Instruksi tersebut menjadi pedoman bagi seluruh kepala daerah yang wilayahnya terkena dampak secara langsung ataupun tidak langsung dari wabah corona dan memerlukan tindakan antisipasi dan pemulihan situasi atau kondisi.

Peraturan Menteri Keuangan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional, pagu dana desa ditetapkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020. Penyesuaian Dana Desa untuk masing-masing daerah kabupaten atau kota secara proporsional terhadap nilai Alokasi Dana berdasarkan nilai pengurangan pagu Dana Desa setiap Desa.

Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat mendapat dana desa tahun anggaran 2020 dengan rincian dana desa sesuai Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020. Penanggulangan Pandemi Covid-19 dapat berupa Bantuan Langsung Tunai yang berjumlah 37,6% dari Pagu Dana Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.764.201.000,-. Sasaran program/ kegiatan diberikan kepada keluarga miskin sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada sebesar. Menurut Omdusman (2020) menyatakan bahwa Kepala Desa harus mampu membuat daftar penduduk desa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) agar tepat sasaran pembagian BLT DD tersebut. Namun kenyataan berbeda yang ditemukan di lapangan, desa yang memenuhi kriteria BLT DD tidak sebanding dengan jumlah anggaran, yang diambil dari dana desa. Penelitian ini juga ingin menguji kembali penelitian sebelum dengan judul sejenis karena masih menemukan hasil yang berbeda-beda (Hutami, 2017; Kehik & Mael, 2017; Shuha, 2018; Ridha, 2019)

Berdasarkan uraian diatas maka rumusan masalah adalah bagaimana pengelolaan dana desa khususnya pada tahap penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses pengelolaan dana desa dalam hal ini penanggulangan Pandemi Covid19.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan teknik studi kasus dengan pendekatan deskriptif

kualitatif (Jogiyanto, 2014). Studi kasus meliputi analisis mendalam dan kontekstual terhadap terhadap situasi yang mirip dalam organisasi lain, di mana sifat dan definisi masalah yang terjadi adalah serupa dengan yang dialami dalam situasi saat ini (Sekaran, 2015). Deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan data yang diperoleh melalui instrumen penelitian.

Populasi dalam penelitian ini adalah data sampai bulan mei tahun 2020 sebanyak 1.545 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 778 jiwa dan wanita sebanyak 767 jiwa perempuan yang terbagi dalam 5 wilayah dusun. Sampel dalam penelitian ini adalah responden, terdiri dari 30 responden masyarakat dari lima dusun di Desa Kuanheun dan 10 responden aparat desa yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum dan Perencanaan, Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan dan BPD Desa Kuanheun. Penentuan sampel menggunakan purposive sampling dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang digunakan adalah untuk masyarakat dipilih yang berusia 30 tahun sampai dengan berusia 70 tahun yang diambil secara acak dari lima dusun yang berbeda di desa Kuanheun dan aparat desa karena yang bertugas mengelola keuangan di Desa Kuanheun.

Variabel penelitian yang digunakan adalah: 1) Penganggaran dana desa, 2) tahap pelaksanaan dana desa, 3) tahap pertanggungjawaban dana desa. Sumber data terdiri dari: 1) data primer berupa hasil kuesioner kepada aparat desa dan masyarakat serta hasil wawancara secara langsung kepada Kepala Desa, Sekertaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan, 2) data Sekunder berupa laporan Keuangan Desa, dan bahan literatur serta artikel yang terkait.

Adapun tahapan analisis data yang dikemukakan *Miles dan Huberman* dalam (Nugrahani, 2019) adalah sebagai berikut: 1. Reduksi Data merupakan proses peminan, pemusatan, perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang fokus, penting dalam penelitian, dengan demikian data yang telah di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti pengumpulan data selanjutnya: 2. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang dihasilkan dari observasi, wawancara, kuesioner dan dokumentasi dikumpulkan sehingga tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan: 3. Verifikasi dan Kesimpulan merupakan satu bagian dari konfigurasi yang utuh. Makna-

makna yang muncul dari data uji kebenarannya dan kesesuaiannya sehingga validasinya terjamin. Dalam tahap ini, peneliti mengkaji secara berulang-ulang terhadap data yang ada, dikelompokkan yang telah terbentuk, kemudian melaporkan hasil penelitian secara lengkap.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil menunjukkan bahwa tahap Penganggaran Dana Desa di Desa Kuanheun sudah baik dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hal ini karena tingkat partisipasi masyarakat juga dilibatkan dalam proses penyusunan Anggaran di Desa Kuanheun.

Menyusun APBDes Desa Kuanheun turut memperhatikan prinsip-prinsip penyusunan APBDes antara lain sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan urusan dan kewenangannya, tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan, transparan, partisipatif, memperlihatkan asas keadilan dan kepatuhan dan substansi APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah serta peraturan desa lainnya. Desa Kuanheun juga turut dilibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk melihat kembali RPJMDes dan RKPDes yang akan ditetapkan.

Rencana Kerja Anggaran yang ditetapkan menjadi acuan dalam rancangan APBDes Desa Kuanheun karena dalam RKA dirincikan anggaran pendapatan dan belanja yang akan dilaksanakan selama satu tahun. partisipasi masyarakat juga terliabt dalam musyawarah untuk menetapkan draft APBDes Awal untuk diasistensi dan diverifikasi oleh tim asistensi tingkat kabupaten.

Aparat desa juga telah melakukan hal yang tepat dalam hal proses penyusunan anggaran dan belanja di Desa Kuanheun yang disesuaikan dengan ketentuan dan regulasi terbaru dalam penyusunan APBDes dikarenakan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran, salah satunya Dana Desa. Penggunaan anggaran Dana Desa yang diprioritaskan untuk penanganan Pandemi Covid-19, aparat desa di Desa Kuanheun juga mengalami perubahan anggaran Dana Desa yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020 dengan total anggaran Dana Desa Desa Kuanheun sebelum perubahan

sebesar Rp.775.008.000,- dan setelah perubahan sebesar Rp.764.201.000,

Proses penyusunan APBDes Desa Kuanheun sudah disesuaikan dengan perubahan anggaran Dana Desa dan perubahan priortias penggunaan Dana Desa dalam hal penanganan Pandemi Covid-19, karena peraturan tentang Perubahan anggaran dana desa dan prioritas penggunaan dana desa dikeluarkan sebelum APBDes ditetapkan, maka dari itu Desa langsung menyesuaikan dan peraturan dan ketentuan yang baru, kegiatan penanggulangan Pandemi Covid-19 masuk kedalam akun Belanja Tak Terduga yang di dalamnya diperuntukan untuk pencegahan Covid-19 dan Bantuan Langsung Tunai Desa.

Hasil menunjukkan bahwa pada tahap kedua yaitu Pelaksanaan dana desa di Desa Kuanheun sudah dilaksanakan dengan baik dalam hal penanganan pandemi covid-19. Hasil ini menggambarkan bahwa pengelolaan Dana Desa di Desa Kuanheun khususnya dalam tahap pelaksanaan penggunaan dana desa dalam penanggulangan pandemi Covid-10 sudah dilakukan dengan baik.

Pelaksanaan penggunaan dana desa di Desa Kuanheun sudah baik dilaksanakan dari tahap penyaluran dana desa sendiri dimana dana desa di salurkan menurut Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2020 Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD. Pemotongan Dana Desa setiap daerah kabupaten dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan dana desa dari Bupati. Persyatan Penyaluran adalah Tahap 1 (40%) berupa peraturan Desa mengenai APBDes, Tahap II (40%) berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya. Tahap III (20%) berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran dana desa tahap II menunjukkan realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dan capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 50% (lima puluh persen), laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat desa tahun anggaran sebelumnya, peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT desa.

Dana Desa juga di prioritaskan untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka menanggulangi dampak ekonomi atas pandemi

Covid-19. Kegiatan tersebut antara lain kegiatan penanganan Pandemi Covid-19 dan Jaring Pengaman sosial di desa yang berupa BLT. Dalam pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 tersebut perlu di bentuk relawan Covid-19 Desa yang membantu proses pelaksanaan kegiatan penanganan Covid-19 tersebut.

Kegiatan penanganan pandemi Covid-19 antara lain berupa kegiatan pengadaan bahan kebutuhan pokok bagi penduduk desa terdampak, pengadaan bahan dan alat-alat kesehatan dan kegiatan lainnya sesuai dengan kebutuhan yang berlaku dan Jaring Pengaman Sosial Desa berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya Pandemi Covid-19. Pemerintah desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Besaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga penerima manfaat per bulan. Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggarkan dalam APBDes paling banyak sebanyak 35 % (tiga puluh lima persen) dari dana desa yang diterima desa yang bersangkutan. Desa Kuanheun menanggarkan Rp.190.800.000,- untuk 106 daftar penerima BLT Dana Desa di Desa Kuanheun.

Sasaran penerima BLT di Desa Kuanheun telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sudah di informasikan kepada masyarakat Sasaran penerima BLT Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20 Tahun 2020 Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa paling sedikit memenuhi kriteria yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan Tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) menurut Permendes PDTT Nomor 7 Tahun 2020 adalah keluarga miskin non program keluarga harapan/bantuan pangan non tunai antara lain. Kehilangan mata pencaharian, belum terdata (*exclusion error*), Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis.

Hasil menunjukkan bahwa pada tahapan terakhir pertanggungjawaban dana desa belum sepenuhnya dilakukan dengan baik hal ini ditunjukkan hasil kuesioner aparat desa dengan presentase 89 % dan masyarakat 91,1% dan hasil wawancara yang menunjukan pertanggungjawaban yang dilaksanakan dalam bentuk laporan baik laporan semester maupun tahunan, meskipun belum ada laporan yang

bisa didokumentasikan karena laporan semester baru akan dilaporkan setelah dana desa tahap kedua selesai , karena di Desa Kuanheun baru dana desa tahap satu yang direalisasikan, laporan pertanggungjawaban lebih lengkap akan didapat jika sudah selesai tahun anggaran. Evaluasi tentang pelaksanaan penggunaan dana desa juga menggambarkan kegiatan penanganan Covid-19 sudah memberikan dampak positif bagi masyarakat desa Kuanheun, meskipun terjadi berbagai perubahan-perubahan dari rencana yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil menunjukkan bahwa penganggaran dana desa di Desa Kuanheun dilakukan sudah cukup baik. Penganggaran dana desa yang diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19 yang dilakukan dengan melakukan penyusunan APBDes Tahun Anggaran 2020 yang disesuaikan dengan *refocusing* kegiatan dan realokasi anggaran, perubahan anggaran dana desa:
2. Hasil menunjukkan bahwa pelaksanaan dana desa di Desa Kuanheun jbelum sepenuhnya dilakukan dengan baik. Pelaksanaan dan Penyaluran anggaran dana desa dimanfaatkan dengan baik untuk program/kegiatan penanganan Covid-19 yang tepat sasaran;
3. Hasil menunjukkan bahwa pada Pertanggungjawaban dana desa belum dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada yang berlaku. Ketidaksesuaian tersebut disebabkan keterbatasan data penelitian yang belum berada dalam tahapan laporan pertanggungjawaban akhir kepada Bupati dan BPD untuk belanja penanganan Covid-19.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Desa Kuanheun Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disarankan yaitu: peningkatan keterbukaan informasi APBDes Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan secara pengumuman tertulis pada laporan atau menggunakan media digital, peningkatan dalam melakukan update data sasaran penerima bantuan menjadi prioritas utama dalam bertahan hidup dan mampu mempertahankan perekonomian desa di masa pandemi Covid-19, meningkatkan profesionalisme aparat desa untuk mematuhi prinsip-prinsip (akuntabilitas, integritas, partisipatif) dalam menyusun pertanggungjawaban dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Hutami, A. S. S. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Abbatireng Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo. *Government: jurnal ilmu Pemerintahan*, 10-19.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah Menteri Dalam Negeri.
- Jogiyanto, (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis* ed.6. Yogyakarta: BPFE.
- Kehik, B. S., & Mael, M. Y. (2017). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Peningkatan Perekonomian Masyarakat Petani di Desa Usapinonot. *Agrimor*, 2(04), 59-62. <https://doi.org/10.32938/ag.v2i04.319>
- Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. *Solo: Cakra Books*, 1(1), 3-4. <http://dx.doi.org/10.30829/ajei.v4i2.5549>
- Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.
- Peraturan Menteri Keuangan 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan TKDD TA 2020 dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional.
- Peraturan Pemerintah Pusat Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan / atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Keuangan.
- Peraturan Bupati Kupang Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.
- Ridha, F. (2019). Analisis pengelolaan dana desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kecamatan langsa kota kota langsa. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 252-276.
- Sekaran Uma, (2015). *Metode Penelitian Untuk Bisnis*, edisi 4, Salemba Empat, Jakarta Selatan 12610.
- Shuha, K. (2018). Analisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan lubuk alung kabupaten padang pariaman). *Jurnal Akuntansi*, 6(2).